

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Kamis 7 November 2024
Wilayah	Kabupaten Wajo



Ambisi Wajo: Pendapatan Rp1,5 T

Ambisi Wajo: Pendapatan Rp1,5 T

TERPISAH, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wajo hanya Rp186 miliar tahun ini. Namun, mereka berambisi bisa membukukan pendapatan Rp1,56 triliun tahun depan.

Dengan proporsi PAD di kisaran Rp200 miliar, Wajo mengharapkan dana besar dari pusat untuk mencapai angka Rp1,56 triliun itu. Proyeksi pendapatan ini telah dimasukkan ke dalam RAPBD 2025. "Secara umum anggaran pendapatan daerah ditargetkan Rp1,56 triliun lebih," ujar Pj Bupati Wajo Andi Bataralifu usai mengajukan RAPBD tahun anggaran 2025, pekan lalu.

FAJAR mendapatkan catatan laporan keuangan Pemkab Wajo per 31 Desember 2023. Anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1.499.566.680.226, realisasinya 101,30 persen atau Rp1.519.047.240.030.

Kondisi menggambarkan pendapatan daerah pada 2025 mengalami kenaikan sekitar Rp48 miliar. Bataralifu mengharapkan proses penyusunan rancang-

an APBD 2025 butuh sinergi dan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Sinergitas tersebut bertujuan memastikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta memperhatikan dan kepentingan aspirasi masyarakat.

"Tantangan utama dalam pembangunan tahun 2025 masih dominannya dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengindikasikan kemampuan finansial dari pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal menopang pembangunan di Wajo," ucapnya.

Pendapatan daerah tersebut diperoleh dari PAD Rp186 miliar lebih. Meliputi pajak daerah Rp50 miliar, retribusi daerah Rp11 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp107 miliar.

"Sementara pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditarget Rp1,380 triliun, diperoleh dari transfer dari pemerintah pusat Rp1,30

triliun, pendapatan transfer antardaerah Rp79 miliar," rincinya.

Ranperda APBD 2025 diharapkan untuk mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur yang berkualitas.

"Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pemerintah seperti standar pelayanan minimal, pembangunan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Dahlan menyampaikan, belanja daerah 2025 direncanakan Rp1.567 trillun.

"Ini terdiri belanja operasi Rp1.077 triliun, belanja modal Rp267 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp20 miliar, serta belanja transfer Rp202 miliar," tutupnya. **(man/zuk)**